

**LAPORAN HASIL PENELITIAN  
HIBAH PENELITIAN TIM PASCASARJANA-HPTP  
(HIBAH PASCA)**



**MODEL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH (PILKADA):  
Sebuah Studi Tentang Format Pemilihan Gabungan**

**Oleh :**

- Ketua : Prof. Dr. Absori, S.H., M.Hum**  
**Anggota : 1. Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum**  
**2. Yuristiarso Hidayat, S.Sos**  
**3. Muridah Isnawati, S.H.**  
**4. Ahmad Labib, S.H.**

Dibiayai Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional dengan  
Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Nomor 188/P2H/PP/DP2M/III/2008  
Tertanggal, 06 Maret 2008

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2009**

## HALAMAN PENGESAHAN

### LAPORAN TAHUN KEDUA

---

---

1. Judul Penelitian : MODEL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA): Sebuah Studi Tentang Format Pemilihan Gabungan.
2. Peneliti Utama
- a. Nama Lengkap : Prof. Dr. Absori, S.H., M.Hum.
  - b. Jenis Kelamin : Laki-laki.
  - c. NIK : 535
  - d. Jabatan Fungsional : Pembina Tk.I
  - e. Jabatan Struktural : Wakil Rektor III UMS
  - f. Bidang Keahlian : Hukum Pemerintahan Daerah
  - g. Program Sudi : Program Magister Ilmu Hukum  
Program Pascasarjana UMS

3. Daftar Anggota Peneliti dan Mahasiswa

No	N A M A	Bidang Keahlian	Fakultas/Jurusan	Perguruan Tinggi
1.	Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati,S.H.,M.Hum	Teori Hukum	Program pascasarjana/ program Magister Ilmu Hukum	UMS
2.	Yuristiarso Hidayat,S.Sos	HTN	Program pascasarjana/ program Magister Ilmu Hukum	UMS
3.	Muridah Isnawati,S.H.	HTN	Program pascasarjana/ program Magister Ilmu Hukum	UMS
4.	Ahmad Labib,S.H.	HTN	Program pascasarjana/ program Magister Ilmu Hukum	UMS

4. Pendanaan dan Jangka Waktu Penelitian
- a. Jangka waktu penelitian yang diusulkan : 3 tahun
  - b. Jangka waktu penelitian yang sudah dijalani : 1 tahun
  - c. Biaya total yang diusulkan : Rp. 270.000.000
  - d. Biaya yang disetujui tahun I : Rp. 85.000.000
- 

Surakarta, 16 Nopember 2009

Mengetahui:  
Direktur Program Pascasarjana

Peneliti Utama,



Handwritten signature of Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati in black ink.

Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H.,M.Hum  
NIK. 537

Handwritten signature of Prof. Dr. Absori in black ink.

Prof. Dr. Absori, S.H.,M.Hum  
NIK. 535

Menyetujui  
Ketua Lembaga Penelitian



Handwritten signature of Dr. Harun Joko Prajitno in black ink.

Dr. Harun Joko Prajitno, S.E.,M.Pd  
NIP. 132049998.

## RINGKASAN

Fokus permasalahan yang dikaji dalam penelitian dengan judul, Model Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada): Sebuah Studi Tentang Format Pemilihan Gabungan, yaitu: pelaksanaan pilkada gabungan yang diselenggarakan di Provinsi Kalimantan Selatan, dan kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan kebijaksanaan nasional tentang pilkada gabungan di Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian adalah : (1) mendeskripsikan pelaksanaan pilkada gabungan yang telah dilakukan di Provinsi Kalimantan Selatan; (2) Mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan pilkada gabungan di Provinsi Kalimantan Selatan; (3) mendeskripsikan dan mengeksplanasikan kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan kebijaksanaan nasional tentang pilkada gabungan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Penelitian yang bersifat deskriptif dan eksplanatif ini, mendasarkan pada metode pendekatan non-doktrinal. Untuk itu di dalam penelitian ini data yang diperlukan berupa data primer maupun data sekunder, yang dikumpulkan dengan cara wawancara secara mendalam dan studi kepustakaan. Untuk selanjutnya data-data yang telah terkumpul tersebut dianalisis dengan metode analisis kualitatif

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan dapatlah diketahui, bahwa: (1) Pelaksanaan Pilkada Gabungan yang diselenggarakan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan bersama-sama dengan pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota di 7 kabupaten/ Kota di provinsi Kalimantan Selatan, pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hanya aja dalam dua hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dalam: (a) penetapan Daftar pemilih tetap, dan; (b) Pelaksanaan sosialisasi dan kampanye dari para calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan dan Calon Bupati/ Walikota dan Wakil Bupati/Walikota di 7 kabupaten/ Kota di provinsi Kalimantan Selatan, yang dilakukan dalam waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan sosialisasi dan kampanye; (2) Penyelenggaraan Pilkada Gabungan di Kalimantan Selatan secara efektif dapat menghemat biaya penyelenggaraan Pilkada, akan tetapi tidak efektif meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada; (3) Kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan kebijaksanaan nasional tentang pilkada gabungan di Provinsi Kalimantan Selatan, adalah : Tentang penetapan jadwal penyelenggaraan Pilkada, pengadaan logistik penyelenggaraan pilkada yang harus merujuk pada Keppres No. 80 tahun 2003, mekanisme pencairan dana bantuan, penentuan rencana anggaran untuk keperluan Panwas pilkada dan pengamanan selama pilkada, data pemilih tetap, surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Niaga, Surat keterangan "sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter". Adanya kelemahan dalam pengaturan Pilkada yang kemudian menimbulkan berbagai persoalan

Kata Kunci : *Pilkada Gabungan, hukum, efektivitas, kendala..*

## Summary

The focus of the problems that were examined in the study with titles, Model Organization of Regional Head Election (Elections): A Study About the Format Selection Combined, namely: the implementation of a joint election held in South Kalimantan Province, and the constraints that hinder implementation of the policy joint national elections in the province South of Kalimantan . As the aim of the research are: (1) describe the implementation of the election combination that has been done in the province of Kalimantan South; (2) describe the effectiveness of the combined elections in the province of South Kalimantan; (3) describe and constraints explanation which hinder the implementation of national policies about the joint election in South of Kalimantan Province.

The research is descriptive and explanation, based on the method of non-doctrinal approach. To that in this study required data in the form primary data and secondary data, collected by in depth how to interview and literature study.

For further data has been collected is analyzed by the method of qualitative analysis. Based on the results of a study conducted it can be known, that: (1) Implementation of the Joint Election held to select South Kalimantan, together with the election of the regent / Mayor and Vice Regent in 7 districts / cities in South Kalimantan province, in general has implemented in accordance with the laws and regulations applicable. It's just the two things that do not match with the legislation in force, namely in: (a) voter list remains, and (b) Implementation of socialization and the campaigns of the candidates Governor of South Kalimantan Governor and Candidate Regent / Mayor and Vice Regent in 7 districts / Cities in South Kalimantan province, which is in time-barred time to socialize and campaign; (2) Organization of the Joint Election South Kalimantan can effectively save costs elections, but not

effective enhance public participation in the election; (3) The constraints that hinder implementation of the policy joint national elections in the province of Kalimantan South, are: About the determination of the schedule for the election, procurement logistik organizing elections that must refer to the Decree No. 80 tahun 2003, aid disbursement mechanisms, determination of the budget plan for the purposes of the election Panwas and security during the election, voter data remains, the letter information was not declared bankrupt by the Commercial Court, Certificate "healthy physically and spiritually based thorough medical examination of the medical team ". A weakness in a later election arrangements cause various persoalan

Keywords: *Joint elections, law, effectiveness.*

## **CAPAIAN INDIKATOR KINERJA**

Penelitian yang dilakukan pada tahun kedua ini, mendasarkan pada metode pendekatan non-doktrinal. Oleh karena itu, penelitian ini mendasarkan pada data primer dan data sekunder.

Dengan mendasarkan pada teknik wawancara dan studi kepustakaan serta studi dokumenter telah diperoleh berbagai data yang dibutuhkan.

Adapun data-data yang diperoleh meliputi :

1. Data primer berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua KPUD Provinsi Kalimantan Selatan dan Sekretaris KPUD Provinsi Kalimantan Selatan, tentang pelaksanaan Pilkada Gabungan di Kalimantan Selatan.
2. Data Sekunder, yang berupa laporan pelaksanaan Pilkada yang dikeluarkan oleh KPUD Provinsi Kalimantan Selatan dan KPUD dari 5 kabupaten untuk pemilihan bupati/wakil bupati (yaitu kabupaten: Kotabaru, Hulu Sungai Tengah, Banjar, Tanah Bumbu dan Balangan) dan pilkada 2 kota untuk pemilihan walikota / wakil walikota, (yaitu kota: Banjarmasin dan Banjarbaru), yang secara bersama-sama menyelenggarakan pilkada gabungan.

Setelah seluruh data diperoleh maka seluruh data dianalisis dengan metode analisis kualitatif, sehingga pada tahap akhirnya diketahui bagaimanakah pelaksanaan pilkada gabungan di Kalimantan Selatan, beserta tingkat efektifitas dan kendala-kendala yang dihadapi.

## **PRAKATA**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur, Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat melakukan penelitian dan menyelesaikan penyusunan laporan penelitian ini.

Penelitian yang berjudul : MODEL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA): Sebuah Studi Tentang Format Pemilihan Gabungan merupakan penelitian tim hibah pascasarjana yang dilakukan oleh dosen-dosen Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UMS, merupakan sebuah upaya untuk menemukan model pengaturan bagi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah gabungan, sebagaimana yang telah dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Selatan ini

Sebagai rasa syukur atas terselesaikannya penelitian ini, ungkapan rasa terima kasi, kami haturkan kepada Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas sehingga terlaksananya penelitian ini. Pada akhirnya penulis berharap semoga laporan ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, November 2009  
Tim Peneliti



## Daftar Isi

	Hal
Halaman Pengesahan .....	ii
Ringkasan dan Summary.....	iv
Capain Indikator Kinerja .....	vi
Prakata.....	xi
Daftar Isi.....	xi
Daftar tabel .....	xii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
BAB II. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN TAHUN PERTAMA.....	14
A. Tujuan Penelitian Tahun Kedua.....	14
B. Manfaat Penelitian Tahun Kedua.....	14
BAB III. TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Pemilihan Kepala Daerah.....	15
B. Model, Proses Pembentukan, Dan Evaluasi Kebijakan .....	19
C. Hukum Sebagai Salah Bentuk Kebijakan Publik.....	24
D. Teori Tentang Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat.....	32
BAB IV. METODE PENELITIAN .....	39
BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN .....	297
A. Kesimpulan.....	297
B. Saran-saran.....	299
BAB VII. RENCANA/PENELITIAN TAHUN KEDUA .....	300
A. Tujuan Khusus .....	300
B. Metode .....	301
C. Jadwal Kerja .....	303
BAB VIII. DRAF ARTIKEL ILMIAH .....	304
DAFTAR PUSTAKA .....	326